



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)

SMP/MTs KELAS VII

Berdasarkan Kurikulum 2013



2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BERSAMA SAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

**Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)**

SMP/MTs KELAS VII

(Berdasarkan Kurikulum 2013)

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BEKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

II. Narasumber

1. Drs. Aliyas, M.Pd
2. AKBP Subono, S.Pd., SH., M.M

III. Penulis

1. Drs. Supandi, M.Pd
2. Dr. Arnie Fajar, M.Pd
3. Dr. Achmad Husen, M.Pd

IV. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi
Cetakan Ke-VII, 2017

ISBN 978-602-73155-5-6

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMP/MTs dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017



Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001



KATA PENGANTAR
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

TINGKAT KESELAMATAN, KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KARENA RENDAHNYA BERLALU LINTAS DIMANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MERUPAKAN PERAN STRATEGIS DALAM Mendukung pembangunan ekonomi yang tentunya perlu adanya dukungan, ilmu pengetahuan, teknologi sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perannya guna mengembangkan moda transportasi yang secara tegas bertujuan untuk mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas secara terpadu guna mendorong perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Dengan ini saya selaku KAKORLANTAS POLRI mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kerjasamanya dalam pengembangan pendidikan lalu lintas yang terintegrasi pada mata pelajaran PPKn jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang sederajat, terima kasih kami sampaikan juga kepada tim penyusun yang telah menyelesaikan buku model pengintegrasian pendidikan lalu lintas ini dengan baik

Oleh karena itu di tinjau dari aspek perspektif pendidikan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sangat menjadi perhatian, yang menekankan pada pembelajaran etika, sopan santun dan budaya serta paham pengaturan berlalu lintas yang di laksanakan melalui pembinaan dan program pendidikan lalu lintas sejak usia dini guna meminimalisir korban kecelakaan lalu lintas yang cenderung dominan pada usia sekolah penyebabnya pelanggaran dan rendahnya pengetahuan serta kurang disiplin dalam berlalu lintas.

Selanjutnya saya berharap buku model pendidikan lalu lintas yang terintegrasi pada mata pelajaran PPKn ini dapat disebarluaskan dan diimplementasikan, disosialisasikan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia, semoga buku ini sebagai panduan dan bermamfaat bagi peserta didik untuk mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka menuju Indonesia tertib bersatu keselamatan nomor satu sehingga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.



Jakarta, September 2016
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Manfaat	6
E. Ruang Lingkup	6
 BAB II TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VII TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS	 9
 BAB III MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VII	 19
A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran	 19
B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Silabus	 65
C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	 81
 BAB IV PENUTUP	 103
 DAFTAR PUSTAKA	 105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa "Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah."

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (*kamseltibcarlantas*). Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional." Kemdiknas melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, maka Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan.

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, disisi lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter berlalu lintas.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
7. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional."
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMP/MTs:
 - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
 - b. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - c. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMP/MTs:
 - a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.
3. Pengawas sekolah SMP/MTs:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
 - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. Yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
4. Bagi Kepolisian:
 - a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;
 - b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.

5. Bagi Dinas Pendidikan:

- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;
- b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas..

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (c) keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*);
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut.

Dimensi, Indikator dan nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Materi Pendidikan Lalu Lintas
1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	1. Pengertian a. Lalu lintas b. Rambu-rambu lalu lintas c. Marka jalan, alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas d. Pengamanan diri sebagai pemakai jalan e. Tata cara berlalu lintas dengan benar. f. Peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun

Dimensi, Indikator dan nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Materi Pendidikan Lalu Lintas
g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. g. Keselamatan lalu lintas h. Keamanan lalu lintas i. Ketertiban lalu lintas j. Kelancaran lalu lintas k. Tindakan pengaturan dalam keadaan tertentu. 2. Dua belas (12) gerakan tangan pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi dan isyarat cahaya. 3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamatan jalan. 7. Surat ijin mengemudi (SIM). 8. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. a. Penggolongan jalan b. Pengolongan jenis kegiatan 9. Tips aman perjalanan a. Pemahaman terhadap karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, helm SNI b. Tri siap, yaitu: 1) Siap aturan; 2) Siap diri; 3) Siap kendaraan.
Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	
▪ Kedisiplinan ▪ Ketertiban ▪ Tanggung jawab	

Dimensi, Indikator dan nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas	Materi Pendidikan Lalu Lintas
▪ Kepedulian ▪ Saling menghargai ▪ Toleransi ▪ Kepatuhan ▪ Ketaatan ▪ Kerjasama ▪ Komitmen ▪ Hemat ▪ Kebersamaan ▪ Keadilan ▪ Ikhlas ▪ Sportif ▪ Bijaksana	

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas
2. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn
3. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS

Kurikulum 2013 memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dijabarkan menjadi 4 (empat) Kompetensi Inti (KI), yaitu: sikap spriritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing KI dijabarkan ke dalam sejumlah Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas VII yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 5 (lima) KD, yaitu KD 3.3 s.d. 3.7. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalamnya adalah seluruh KD.

Kompetensi Inti:

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Telaah KI dan KD PPKn terhadap nilai-norma dan moral etika berlalu lintas dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut.

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat	2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara	3.1 Memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara	4.1 Menyaji hasil telaah tentang “sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara”
	2.2 Menghargai perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar	3.2 Memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Menyaji hasil telaah tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	3.3 Memahami isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3 Menyaji hasil kajian isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	2.4 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	3.4 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	4.4 Menyaji hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa
		3.5 Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI	4.5 Menyaji hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI
		3.6 Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	4.6 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras,

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
		3.7 Memahami pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika	budaya, dan gender
			4.7 Menyaji hasil telaah tentang makna Bhinneka Tunggal Ika
			4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

2. Mengidentifikasi KD yang dikembangkan dari Kompetensi Inti Pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi dan indikator Pendidikan Lalu Lintas kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI Keterampilan, KI Spiritual, dan KI sosial.

No	KD Pengetahuan	KD Keterampilan	KD Sikap Spiritual	KD Sikap Sosial
1	3.3 Memahami isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3 Menyaji hasil kajian isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat	2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
2	3.4 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	4.4 Menyaji hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat	2.2 Menghargai perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar
3	3.5 Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI	4.5 Menyaji hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat	2.4 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No	KD Pengetahuan	KD Keterampilan	KD Sikap Spiritual	KD Sikap Sosial
		terhadap keutuhan nasional		
4	3.6 Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	4.6 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat	2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
5	3.7 Memahami pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika	4.7 Menyaji hasil telaah tentang makna Bhinneka Tunggal Ika	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat	2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi dan indikator Pendidikan Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas
1	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 3.3 Memahami isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menyaji hasil kajian isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Mensukuri bahwa perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercapai atas berkat rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. 2. Mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menjelaskan isi makna tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945.	1. Hukum: i. Menaati rambu-rambu lalu lintas j. Menaati marka jalan lalu lintas k. Menaati isyarat pengatur lalu lintas l. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas m. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas
		4. <u>Menjelaskan makna kemerdekaan menggunakan jalan raya menurut pasal 27 UUD 1945</u> 5. <u>Menjelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia</u> 6. <u>Menjelaskan dua materi dasar yang terkandung dalam UUD 1945.</u> 7. <u>Mengidentifikasi pasal pasal yang mengandung hubungan Negara dengan warga Negara menurut UUD 1945</u> 8. <u>Mendeskripsikan hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945.</u> 9. <u>Menunjukkan perilaku tidak semena-mena dalam mengendarai kendaraan bermotor sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945 (nilai kebersamaan).</u> 10. <u>Menampilkan perilaku adil dalam menggunakan jalan raya sebagai wujud pelaksanaan Sila ke 5 Pancasila Dasar Negara Pancasila. (nilai komitmen)</u> 11. <u>Menjelaskan alas an bahwa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR.</u> 12. <u>Menunjukkan sikap perilaku keteguhan hati untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena sebagai hokum dasar tertinggi di NKRI. (komitmen)</u> 13. <u>Membuat laporan tertulis hasil kajian terhadap isi alinea pembukaan UUD 1945.</u>	n. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. o. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. p. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: f. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan g. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. h. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. i. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. j. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: d. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan e. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas
2	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.2 Menghargai perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar 3.4 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4.4 Menyaji hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa	1. Mensyukuri atas terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. 2. Menjelaskan arti pentingnya norma bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. 3. <u>Menjelaskan arti pentingnya mentaati peraturan, tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan (nilai Komitmen)</u> 4. <u>Mentaati terhadap ketentuan atau norma-norma berlalu lintas di lingkungan sekitarnya (nilai disiplin)</u> 5. Menjelaskan fungsi norma di masyarakat 6. Menjelaskan pentingnya mentaati terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. 7. Mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 8. <u>Mengidentifikasi aturan/norma tentang rambu-rambu larangan, perintah an petunjuk minimal 5 buah (nilai disiplin)</u> 9. Menjelaskan sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran norma yang berlaku. 10 <u>Menjelaskan sanksi yang diterima akibat pelanggaran lalu lintas (nilai keadilan)</u> 11 <u>Membedakan sifat norma hukum dengan norma sompan santun.</u> 12. Mendeskripsikan sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 13 <u>Melaksanakan observasi perilaku</u>	f. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: f. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman g. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. h. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan i. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan j. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: e. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. f. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. g. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. h. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas
		<u>penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk UU No. 22 Tahun 2009</u> 14 Melaporkan hasil observasi perilaku menyimpang terhadap norma yang berlaku di masyarakat melalui tayangan .	
3	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 2.4 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3.5 Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. 4.5 Menyaji hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI. 4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	1. Mensyukuri bahwa semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI. 2. Memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI 3. Menjelaskan peran daerah dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mengidentifikasi karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. <u>Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (nilai tanggung jawab)</u> 6. <u>Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya (nilai kepedulian).</u> 7. <u>Menunjukkan perilaku kerukunan</u>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas
4	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 3.6 Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 4.6 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.	sesame pengguna jalan dilingkungan disekitar (nilai kebersamaan). 8. Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya. 9. <u>Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain</u> 10. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. <u>Menampilkan peran serta warga masyarakat di daerahnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan serta ketertiban bersama dalam berlalu lintas</u> 12. Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 13. Mempresentasikan hasil kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI. 1. Mensyukuri adanya keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender dari TYME merupakan kekayaan yang tak ternilai 2. Menunjukkan sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. 3. <u>Memberi bantuan terhadap orang yang orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas (nilai peduli)</u> 4. <u>Menampilkan sikap perilaku memberi</u>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas
		<u>kesempatan bagi penyeberang jalan (peduli)</u> 6. Menampilkan diri saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. <u>Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman terhadap sesama pengguna jalan yang bergaman suku, agama, ras dan status social.</u> 8. <u>Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan</u> 9. <u>Mengidentifikasi factor penghamat dalam menciptakan kerukunan dalam kamjemukan di daerah tempat tinggal di sekitarnya.</u> 10. <u>Menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang beragam.</u> 11. <u>Mempresentasikan hasil observasi keberagaman pengguna jalan ditinjau dari pengguna, jenis kendaraan, dan perilaku pengguna jalan.</u>	
5	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 3.7. Memahami pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> 4.7 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang	1. Menyukuri bahwa ke Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia merupakan anugrah TYME, karena harus tetap dijaga dan dilestarikan, 2. Menjelaskan pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. 3. Mendeskripsikan arti penting semboyan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> bagi bangsa	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas
	mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	Indonesia. 4. <u>Menjelaskan arti pentingnya saling menghargai bagi pengguna jalan yang beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya</u> 5. <u>Menunjukkan sikap positif sesama pengguna jalan raya berasal dari berbagai keberagaman suku, ras, agama dan budaya</u> 6. <u>Menunjukkan contoh partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan nasional.</u> 7. <u>Mengidentifikasi contoh bentuk-bentuk partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap pelaksanaan norma dan moral etika berlalu lintas</u> 8. <u>Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan</u> 9. <u>Menampilkan peran serta dalam kegiatan social sebagai wujud ke-Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah keutuhan nasional.</u> 10. <u>Menyajikan hasil kajian tentang bentuk-bentuk partisipasi warga masyarakat yang mencerminkan komitmen persatuan dan kesatuan demi terwujudnya keutuhan nasional.</u>	

BAB III

MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS VII

A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti:

- 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- 4: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
1	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para	1. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Isi makna tiap	2 X 3 JP	1 Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan	Isi makna tiap aliena Pembukaan UUD 1945. Baca dan cermati pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam,

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
	pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 3.3 Memahami isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menyaji hasil kajian isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	alinea dalam Pembukaan UUD 1945. 3. <u>makna kemerdekaan menggunakan jalan raya menurut pasal 27 UUD 1945</u> 4. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 5. Dua materi dasar yang terkandung dalam UUD 1945. 6. Pasal pasal yang mengandung hubungan Negara dengan warga Negara menurut UUD 1945 7. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. 8. <u>Perilaku tidak semena-mena dalam mengendarai</u>		kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan	mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah: Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembedaan perjuangan, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan peninjauan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.. Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, yaitu menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
		<u>kendaraan bermotor sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945 (nilai kebersamaan).</u> 9. <u>Perilaku adil dalam menggunakan jalan raya sebagai wujud pelaksanaan Sila ke 5 Pancasila Dasar Negara Pancasila.(nilai komitmen)</u> 10. Alasan bahwa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR. 11. Sikap perilaku keteguhan hati untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena sebagai hokum dasar tertinggi di NKRI. (komitmen) 12. Membuat laporan tertulis hasil kajian		badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam penggunaan bahan bakar kendaraan/ transportasi. 4. Psikologi a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap	yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Isi makna tiap alinea sebagaimana diterangkan di atas bila dikaitkan dengan UU No. 22 Tahun 2009, sangat jelas bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Selanjutnya dinyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, keterlambatan, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; • Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
		terhadap isi alinea pembukaan UUD 1945.		perilaku lebih mengutamakan rasa aman c. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan f. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas	dijabarkan di atas, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran terperinci dari proklamasi. Proklamasi kemerdekaan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan itu tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian Pembukaan UUD 1945. <u>Untuk mewujudkan amanat yang tertuang dalam alinea kedua, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur diperlukan landasan aturan yang jelas dan tegas, termasuk aturan berblalu lintas.. Kemerdekaan dan keadilan ketika menggunakan jalan raya. akan berbeda dengan kemerdekaan dan keadilan di bidang pendidikan, politik, social, hukum, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu setiap aspek kehidupan diperlukan</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
				berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas. Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas ▪ Kedisiplinan ▪ Ketertiban ▪ Tanggung jawab ▪ Kepedulian ▪ Saling menghargai ▪ Toleransi ▪ Kepatuhan ▪ Ketaatan ▪ Kerjasama ▪ Komitmen ▪ Hemat ▪ Kebersamaan ▪ Keadilan ▪ Ikhlas ▪ Sportif ▪ Bijaksana	<u>peraturan sendiri-sendiri, termasuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan. Siapapun boleh menggunakan jalan raya, siapapun boleh mengendarai kendaraan bermotor, tetapi ada syarat yang menggunakan haknya. Seperti memiliki SIM, memakai helm, dsb.</u> • Dua materi dasar yang terkandung dalam UUD 1945. UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya memuat dua materi dasar, yaitu: 1) pengaturan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan negara, termasuk di dalamnya pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara satu dan lainnya serta 2) pengaturan tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, serta konsepsi negara di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial budaya,

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					pendidikan, pertahanan keamanan, hak asasi manusia, dan lain-lain. <u>Berdasarkan uraian di atas, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sebagai pelaksanaan UUD 1945 dibuat untuk mengatur penduduknya atau warga Negaraketika berada di jalan raya. Setiap penduduk ataupun warga Negara ketika menggunakan jalan raya terikat oleh aturan di jalan raya yaitu UU No. 22 Tahun 2009.</u> • UUD 1945 menjadi sumber hukum material di Indonesia. Berdasarkan makna bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia, maka setiap warga Negara wajib mematuhi dan taat terhadap ketentuan dalam pasal-pasalanya, dan setiap peraturand perundangan dibawah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, termasuk UU No. 22 Tahun 2009. <u>Sebagai warga Negara yang baik setiap warga masyarakat Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tersebut. Oleh karena itu tidak dibenarkan apabila pengendalai</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					kendaraan bermotor di jalan raya dengan sesuka hati, karena tidak sesuai isi makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 (kebersamaan, disiplin) • Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan proklamasi tidak dapat dipisahkan. Alinea kedua pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka" Alinea ketiga ini memperlihatkan keterkaitan makna antara proklamasi dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan dalam

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dapat pula disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. <u>Guna menialankan UUD dibuatlah UU oleh DPR bersama Presiden, termasuk UU No. 22 Tahun 2009. Oleh karena itu UU No. 22 tahun 2009 dimaksudkan untuk melaksanakan cita-cita dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Terwujudnya tertib lalu lintas, kelancaran, keamanan berlalu lintas merupakan keinginan bersama. Pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 termasuk pengkhianatan terhadap cita-cita luhur dan keinginan luhur bangsa Indonesia.</u> • Alasan bahwa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR Beberapa pihak secara tegas menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 sudah menjadi harga

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					mati, tidak dapat diubah ataupun diamandemen, dengan megemukakan alasan, pertama ; Di dalam pembukaan memuat dasar negara, <u>kedua</u> pembukaan UUD merupakan perjanjian luhur, cita-cita luhur perjanjian luhur bangsa Indonesia, Merubah pembukaan dapat berarti membubarkan Negara. Oleh karena ketika UUD 1945 dilakukan amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002, MPR sebagai badan yang diberi kewenangan untuk merubahnya sepakat untuk tidak akan merubah pembukaan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan fundamental berdirinya NKRI. Sedangkan batang tubuh atau pasal-pasal nya dapat diubah sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat Indonesia. Untuk menjalankan UUD 1945 diperlukan UU, sehingga prinsip mendasar, setiap produk peraturan perundangan dibawah UUD 1945 seperti UU, PP, Perpres, Permen tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Salah produk UU adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu setiap warga Negara harus

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
2	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.2 Menghargai perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar 3.4 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4.4 Menyaji hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.	1. Pengertian norma 2. Arti pentingnya norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Arti pentingnya mentaati peraturan, tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan 4. Taati terhadap ketentuan atau norma-norma berlalu lintas di lingkungan sekitarnya. 5. Fungsi norma di masyarakat 6. Pentingnya mentaati terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. 7. Macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 8. <u>Aturan/norma dan makna tentang</u>	3 X 3 JP		<u>tunduk dan patuh terhadap ketentuan UU.</u> • Pengertian Norma: Norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah, aturan, adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun secara umum hanya ada dua yaitu aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang, dan aturan yang dibuat dan tumbuh berkembang di masyarakat. Kaidah, aturan tersebut dibuat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena diperlukan adanya norma. <u>Setiap aspek kehidupan dimanapun berada pasti diperlukan aturan, kaidah yang disebut norma, termasuk kehidupan di jalan raya. Dengan adanya aturan, kaidah di jalan, diharapkan setiap pengguna jalan patuh dan taat terhadap aturan di jalan, maka akan tercipta suasana jalan yang tertib, aman, lancar dan pada akhirnya selamat.</u> Penerapan norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku itu pada dasarnya berkaitan

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
		<u>rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk.</u> 9. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran norma yang berlaku. 10. Perbandingan sifat norma hukum dengan norma sopan santun. 11. Sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 12. <u>Observasi perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk UU No. 22 Tahun 2009.</u> 13. Laporan hasil observasi perilaku menyimpang terhadap norma lalu lintas yang berlaku di masyarakat melalui tayangan.			dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. Mulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dalam kehidupan di masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik (Priyanto, dkk 2008). Ada 4 macam norma, (1) agama, (2) kesopanan, (3) Kesusilaan, (4) hukum. Ciri norma hukum adalah (1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib atau nerwenang; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas. Contoh Undang-Undang Nomor 22 tahun

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					2009 dan UU No. 38 tahun 2005 termasuk norma hukum. Oleh karena itu bagi pelanggaran terhadap norma hukum, akan memperoleh sanksi yang tegas, termasuk melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. • Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa setiap norma, berisi dua macam yaitu perintah dan larangan. keduanya bertujuan untuk terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebaiknya tanpa ada norma, maka dapat timbul kekecauan, ketidaktertiban. Demikian juga UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk salah satu norma yang berisi perintah dan larangan agar terciptaketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan di jalan. • Pemampilan Perilaku sesuai norma Agama: Peraturan hidup berisi perintah, larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa bagi pelanggarnya mendapat

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					siksa di kelas kemudian. Perilaku tersebut antara lain: - Tidak membunuh orang lain. - Tidak mencuri. - Patuh kepada orang tua. - Melaksanakan ibadah. - Tidak melakukan penipuan. - Tidak bohong. - Tidak melakukan perzinahan. - Tidak sombong. • Penampilan Perilaku sesuai norma Kesopanan Norma kesopanan lebih menekankan asas kepantasan atau kepatutan dimasyarakat, se-hingga ukurannya adalah hati nurani <u>Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi.</u> - Jangan makan sambil berbicara - Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat dan. - Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. - Jangan memacu kendaraan di <u>jalan raya dengan kecepatan yang tinggi.</u> <u>Beri kesempatan bagi penyeberang jalan.</u> <u>mengendarai motor dengan suara</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					<u>kenalpot keras.</u> Norma kesopanan, sanksi memang tidak tegas seperti norma hukum, memang bersumber dari hati nurani, sehingga bagi pelanggarnya dikembalikan lagi pada yang bersangkutan ddiukur dari kepantasan. • Penampilan Perilaku sesuai norma Kesusilaan Norma kesesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati sanu-bari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh norma ini diantaranya ialah : "Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain" . "Kamu harus berlaku jujur" . "Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia" . "Kamu dilarang membunuh sesama manusia" . <u>Ketika ada petunjuk "kurangi kecepatan" karena tikungan tajam, misal kemudian dilanggar dan berakibat kecelakaan lalu lintas, maka setelah kejadian baru menyesal. Oleh karena itu ketika orang bertindak tanpa dilandasi oleh hati nurani, dan berakibat buruk,</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					atau tidak baik barulah muncul penyesalan. Contoh lain ketika Anda mengendarai motor, tidak memberi kesempatan kepada pengendara lain, dan akhirnya terjadi tabrakan, mesti kamu akan merasa menyesal. Intinya ketika berlalu lintaspun, etika atau untuk berbuat baik kepada orang lain sangat diperlukan. ► Penampilan Perilaku sesuai Norma Hukum : Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga yang berwenang isinya mengikat dan memaksa setiap orang dan bagi pelanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Pasal 28 ayat (1) berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. Sering kita jumpai penggalan jalan, penutupan jalan karena aktivitas warga, pasar tumpah, yang sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan isi pasal 28 ayat (1) tersebut. Contoh: Ketika akan membelokkan kendaraan pengemudi mem-beri isyarat lampu/tangan bahwa kendaraan bermotor yang dikemudikan akan membelok. (aspek

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					<u>hukum). Sanksi: Pidana UU No. 22 Tahun 2009 pasal 294."Pengendara bermotor ketika akan membelokan atau kembali arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</u> ► Penerapan norma kebiasaan Penerapan perilaku sesuai kebiasaan di rumah: seperti (1) menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur, (2). Beribadah melakukan kewa-jiban kepada Tuhan (3) Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Contohnya antara lain menyapu halaman rumah. (4) Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai norma dalam kehidupan keluarga. Penerapan kebiasaan di lingkungan sekolah (1) belajar dengan tekun, (2) menggunakan seragaman sekolah, (3) menggunakan identitas sekolah, (4) datang tepat waktu, (5) pulang sekolah tepat waktu, (6) mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru sekolah,

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					(7) Melaksanakan Patroli Keamanan Sekolah, (8) Berjalan di sebelah kiri kita menuju sekolah, (9) dan sebagainya. <u>Penerapan kebiasaan di lingkungan jalan raya, seperti (1) selalu berjalan di sebelah kiri, (2) mengijormati para pengguna jalan, (3) menggunakan helm, bila naik motor, (4) menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil, dsb.</u>
3	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.4 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari NKRI. 3.5 Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI 4.5 Menyaji hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI.	1. Pentingnya pemahaman daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari NKRI. 2. Pentingnya kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI 3. Peran daerah	2 x 3 jp		► Daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) ** Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
	4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Karakteristik potensi sumber daya daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. <u>Upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa</u> 6. <u>Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya.</u> 7. <u>Contoh keteladanan perilaku kerukunan sesama pengguna jalan di lingkungan di sekitar</u>			dengan undang-undang (Pasal 18 (1)** Selanjutnya lihatlah dalam peta Indonesia, amati daerah tempat tinggal termasuk di daerah Kecamatan/distrik mana?Kab/Kota dan provinsi mana?Apa artinya itu? Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri atas wilayahkecamatan, kabupaten/kota, provinsi. Di masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda-beda, dan dihubungkan oleh sarana dan prasaranalalu lintas dan angkutan jalan.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan danpengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Karena itulah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat. ► Arti penting daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
		8. Contoh perilaku positif agar tidak terjadi konflik antar teman sebaya/daerah demi terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungannya. 9. <u>Memberi kesempatan kepada pengendara lain yang ingin mendahului sesama pengguna jalan demi kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain</u> 10. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. <u>Peran serta warga masyarakat di daerahnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan serta ketertiban bersama dalam</u>			dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [UUD 1945 Pasal 18 (1)**]. Lihatlah peta Indonesia, Anda bertempat di Provinsi dan kabupaten atau kota mana? Dimanapun Anda berada, panggilan tempat adalah wilayah NKRI. Sebuah Negara yang besar dan luas, jumlah penduduk kurang lebih sekitar 240 juta, luas wilayah daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km². NKRI merupakan yang besar, beraneka ragam suku, agama, budaya, bahasa, ras, pekerjaan, mata pencaharian dan lain sebagainya. Namun yang membanggakan ketika proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat bersepakat tetap mempertahankan NKRI. <u>Daerah yang begitu luas, perlu diperlu-kan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu untuk menghubungkan semua wilayah di daratan (UU No. 22 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1), agar terwujudnya keamanan, keselamatan-an, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
		berlalu lintas 12. Ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 13. Presentasi hasil kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI			Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah diperlukan aturan yang disebut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ► Ciri-ciri/karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI Yang dimaksud daerah tempat tinggal adalah Daerah tempat tinggal adalah daerah yang kita tempati dalam salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. Menurut UUD 1945 disebutkan NKRI terdiri atas daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten atau kota. Antar daerah provinsi, kabupaten dan kota serta daerah yang lebih kecil seperti kecamatan, desa diperlukan sarana jalan. Dengan dibukanya jalan dinamika perekonomian di daerah semakin meningkat. Setiap keberadayaan jalan diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. (UU NO. 22 Tahun 2009 pasal 5 ayat (2). Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda seperti nama, luas, budaya, sejarah, kesenian khas, makanan

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					khas, dan potensi daerah. Daerah-daerah tersebut sangat penting, karena NKRI tidak akan berdiri tegak dan kukuh tanpa didukung oleh daerah. Karena keberadaan daerah sangat penting bagi NKRI. <u>Setiap daerah perlu menghubungkan jalan antar daerah, karenadalam menjalankan roda pemerintahan, dan mendukung pembangunan serta integritas nasional diperlukan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Karena ituLalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umumsebagaimana-diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u> <u>Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 25 dinyatakan bahwa Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:</u> <u>Rambu Lalu Lintas;</u> <u>Marka Jalan;</u> <u>Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;</u> <u>Alat penerangan Jalan;</u> <u>Alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;</u> <u>Alat pengawasan dan</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					<u>pengamanan Jalan</u>; g. <u>Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan</u> h. <u>Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.</u> ► Upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk tetap tegaknya dan utuhnya NKRI, diperlukan partisipasi aktif setiap warga Negara. Upaya menjaga keamanan lingkungan harus didasarkan semangat persatuan dan kesatuan, baik lingkungan social maupun fisik. Bentuk partisipasi warga untuk mewujudkan keamanan lingkungan social seperti selalu menjaga kerukunan, gotong royong, saling menghargai, saling membantu, di antara warga. Sedangkan untuk menjaga lingkungan fisik, seperti peduli terhadap kerusakan lingkungan, menjadi anggota TN/POLRI, menjaga mercusuar, menjaga perbatasan, melestarikan lingkungan hutan, melestarikan sumber daya air, menjaga kelestarian flora dan fauna. Sedangkan untuk mewujudkan

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					keamanan lingkungan dalam berlalu lintas diperlukan sikap perilaku tertib, saling menghargai bagi sesama pengguna jalan, selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas. Karena Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah ► Bentuk-bentuk partisipasi secara aktif untuk menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal. Bentuk partisipasi warga untuk menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal dapat berupa berbagai macam aktivitas, antara lain kerjabakti bersih-berish lingkungan, melakukan penghijauan di tepi jalan, potisasi, lampunisasi jalan, pengecatan pagar jalan, berish-berish sampah di sekitar tempat tinggal, Sedangkan bentuk partisipasi warga masyarakat untuk keindahan lingkungan jalan antara lain penanaman pohon penghijauan,

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					pemasangan lampu penerang, memberikan parit jalan, memperbaiki jalan yang berlobang, mengambil atau menyingkirkan benda di jalan yang bisa membahayakan keselamatan berlalu lintas. ► Penampilan perilaku persatuan dan keksatuan dilingkungan sekitar. NKRI adalah harga mati. Itulah kesepakatan seluruh anggota MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945 tahun 1999. Untuk mengisi kesepakatan tersebut, diperlukan perilaku yang mengarah terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Utamanya ketika berinteraksi dengan orang lain di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara, termasuk di lingkungan sesamapengguna jalan. <u>Sikap perilaku yang diperlukan bagi sesamapengguna jalan antara lain saling menghargai sesama pengguna jalan, memberi kesempatan bagi penyeberang jalan, memberi kesempatan bagi pengendara yang ingin mendahului, tidak menggunakan kenalpot yang memekakkan telinga, sopam dalam</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					mengendarai kendaraan bermotor. Dengan penampilan sikap perilaku di jalan seperti itu akan terwujud persatuan dan kesatuan, yang akhirnya tercipta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 Ketentuan Umum, yakni ketertiban Lalu Lintas dan Angkut-an Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. ► Kesadaran untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya. Di media massa sering kita lihat konflik antar siswa dari sekolah yang berbeda. Di kalangan kampus, mahasiswa antar fakultas atau antar kampus. Yang perlu disadari bahwa cerai berai berawal dari konflik antar anggota kelompok atau kelompok, sebaliknya perdamaianberawal dari persatuan dan kesatuan seluruh anggota kelompok atau antar kelompok masyarakat. Hancurnya NKRI, akan berawal dari hancurnya peraturan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran untuk

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					menghindari konflik menjadi embrio terwujudnya perdamaian kelompok masyarakat, daerah maupun lebih luas secara nasional. <u>Tidak jarang konflik terjadi antar geng motorbalapan liar di jalanan. Dengan kecepatan tinggi balapan liar di jalanan umum pada hal bila terjadi kecelakaan berakibat merugikan bagi dirinya maupun orang lain..</u> Pada ecar a tegas dinyatakan pada UU No. 22 Tahun 2009 pasal 21 ayat 1 disebutkan Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Selanjutnya ayat (2) disebut-kan <u>Batas kecepatan paling tinggi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan</u> <u>jalan bebas hambatan.</u> ► Kerukusan di lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai bagian utuh dari ciptanya NKRI. Akhir-kahir ini sering muncul konflik di masyarakat yang sebenarnya disebabkan oleh hal-hal ringan atau sepele. Pada hal demi kukuhnya NKRI, berawal dari kerukunan dan kedamaian masyarakat. Masyarakat sering

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					kacau, timbul konflik, maka pemerintah di daerah juga terganggu. Kalau di daerah sering timbul konflik yang melibatkan antar daerah, maka keutuhan NKRI juga mulai terusik. Oleh karena itu hindari konflik yang timbul di masyarakat. Sumber konflik memang terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak menutup kemungkinan sumber konflik berawal di jalan, sesama pengguna jalan. Agar tetap terpelihara kedamaian, kerukunan, maka sebaiknya konflik harus dihindari. Misalnya ketika menyalip kendaraan lain, orang tersebut merasa tersinggung. Oleh karena itu sikap sabar dalam berkendara memang sangat diperlukan. Yang lebih penting, di dalam pasal 1 ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2009, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama. ► Kesadaran diri bahwa tempat tinggalnya merupakan bagian dari keutuhan wilayah NKRI. Pada hal dalam UUD 1945 pasal 33 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[Pasal 33 (3)]

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					Setelah munculnya undang-undang otonomi daerah, ada tuntutan daerah bahwa sumber daya alam dikelola sepenuhnya oleh daerah yang bersangkutan. Pada hal dalam UUD 1945 telah mengatur hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18A (2)**]. <u>Sedangkan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan daerah disebutkan “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.” Dengan demikian daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di daerahnya masing-masing. Karena pada dasarnya daerah merupakan bagian NKRI.</u>
4	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan	1. Keberagaman suku, agama, ras,	3 x 3 jp		❖ Pentingnya memahami keberagaman suku, agama, ras,

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
	YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gende 3.6 Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 4.6 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	budaya dan gender.dari TYME merupakan kekayaan yang tak ternilai 2. Sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. 3. <u>Memberi bantuan terhadap orang yang orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas</u> 4. <u>Sikap perilaku memberi kesempatan bagi penyeberang jalan</u> 6. Pentingnya saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. <u>Sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman terhadap sesama pengguna jalan</u>			budaya dan gender. Keanekaragaman agama, budaya, tidak terlepas <u>dari</u> kedatangan bangsa asing di Indonesia. Seperti kedatangan Belanda, portugis, Spanyol di Indonesia yang semula berdagang rempat-rempah, juga ada misi penyebaran agama, yaitu Kristen/katholik, karena itu daerah yang dipengaruhi banyak berkembang agama Kristen/Katholik. Sedangkan para pedagang berasal dari Gujarat-India, Persia, dan Arab, ke Indonesia, berkembanglah agama Islam. Bukti sejarah itu sampai sat ini, masih bisa di amati mayoritas pemeluk agama di daerah tersebut. Luas dan besarnya wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau sangat berpengaruh terhadap keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. (Kemendikbud, 2013. PPKn SMP Kelas VII). <u>Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa.</u> Oleh karena itu harus dipertahankan

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
		yang bergaman suku, agama, ras dan status social. 8. <u>Sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan</u> 9. Faktor penghamat dalam menciptakan kerukunan dalam kamjemukan di daerah tempat tinggal di sekitarnya. 10. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang beragam. 11. <u>Presentasikan hasil observasi keberagaman pengguna jalan ditinjau dari pengguna, jenis kendaraan, dan perilaku pengguna jalan.</u>			dan dikelola dengan baik, sehingga tercipta suasana harmonis, damai dan tertib, dalam segala aspek kehidupan. termasuk dalam kehidupan berlalu lintas. Kalau diamati para pengguna jalan, berasal dari berbagai suku, ras, bahkan agama. utamanya di daerah perkotaan. Namun mereka harus tetap taat dan tunduk pada peraturan lalu lintas dan aangkutan jalan yaitu UU No. 22 Tahun 2009. Karena setiap warga Negara berhak untuk menggunakan jalan di manapun berada. ❖ Sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. Kebebasan memeluk suatu agama telah dijamin oleh Negara dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai agama, yang berbeda-beda, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, yang harus kita hindari, antara lain: egoisme, ekstremisme, acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan, dan fanatisme yang berlebih-lebihan. <u>Terkait dengan berlalu lintas, antar dan intern</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					<u>pemeluk agama ketikadi jalan harus saling menghormati dan menghargai, saling menolong bila terjadi kecelakaan, karena pada prinsipnya manusia dengan agama apapun tidak hidup sendirian. Karena itu sikap egosime, ekstremisme dan fanatisme berlebihan harus dihindarkan.</u> ❖ Pemberian bantuan terhadap orang yang orang yang memerlukan atau tertimpa musibah. Dalam berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gendarmenciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini akan sangat menguntungkan bagi semua pihak. <u>Misalnya ketika terjadi kecelakaan di jalan raya, makasikap setia kawan muncul seperti ingin memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada pihak berwajib. Ketika ada kendaraan lain ingin mendahului, maka berikan</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					<u>kesempatan kepadanya, itulah bentuk saling menghormati dan menghargai dalam berlalu lintas.</u> ❖ Saling menyapa dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari Manusia sebagai makhluk social, memiliki sifat hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok, diperlukan saling menegur sapa. <u>Ketika berada di jalan ditemukan para pengguna jalan yang mungkin tidak dikenal, namun ketika terjadi kecelakaan sikap setia kawan muncul, karena itu sikap saling tegur sapa dalam berlalu lintas juga diperlukan.</u> ❖ Menampilkan diri saling menjaga kerukunan dalam berlalu lintas. Kalau dicermati lingkungan sekitar tempat tinggal kita, kehidupan sosial budaya masyarakat sangat beragam. Kehidupan sosial itu dibentuk oleh karena manusia tidak bisa hidup sendirian, tanpa berinteraksi dengan orang lain.. Kehidupan sosial budaya di suatu daerah dipengaruhi berbagai faktor. Faktor lingkungan-an mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					itu kehidupan sosial budaya yang beragama dituntut toleransi, saling menghormati dan menghargai keberadaanya, termasuk ketika berada di jalan raya. Hal ini diperlukan karena yang menjadi syarat terwujudnya kerukunan adalah hal tersebut diatas, yang pada akhirnya akan tercipta kondisi berlalu lintas yang tertib, lancar dan selamat. ❖ Sikap saling menjaga kerukunan dalam berlalu lintas, antara lain: 1) <u>Memberi kesempatan bagi pengendara lain yang ingin mendahului.</u> 2) <u>Menghindari perilaku egosime dalam berlalu lintas.</u> 3) <u>Memberi kesempatan bagi penyebarang jalan.</u> 4) <u>Pemasangan knalpot tidak memecakkan telinga.</u> 5) <u>Tidak mengendarai kendaraan bermotor dengan ugal-ugalan.</u>
5	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan	1. Pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. 2. Arti penting semboyan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> bagi bangsa Indonesia.	3 x 3 jp		❖ Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ditinjau dari keragaman dan jumlah penduduknya. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai ragam ras, suku, bahasa, agama, dan adat

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
	gender 3.7. Memahami pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> 4.7. Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	3. <u>Arti pentingnya saling menghargai bagi penggunaan jalan yang beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya</u> 4. <u>Sikap positif sesama pengguna jalan raya berasal dari berbagai keberagaman suku, ras agama dan budaya</u> 5. <u>Contoh partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan nasional.</u> 6. <u>Contoh bentuk-bentuk partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap pelaksanaan norma dan moral etika berlalu lintas</u> 7. <u>Sikap perilaku lebih</u>			kebiasaan, mata pencarian, flora maupun fauna. Namun semboyan yang dijadikan ideology bangsa adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah perekat yang kuat, karena bangsa Indonesia memiliki sejarah dan nasib yang sama, yaitu bekas jajahan bangsa asing. Perbedaan yang beragam kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Apakah itu hanya kata kiasan untuk Pancasila lambang negara kita saja?. Dapat kita lihat perbedaan ras cukup mencolok di Indonesia ini. Apakah bhineka tunggal ika hanya sebuah kata-kata tanpa arti? Kebhinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Kebhinekaan pun harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. <u>Untuk memupuk semangat kebhinnekaan dalam kesatuan dan</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
		<u>mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan</u> 8. Peran serta dalam kegiatan social sebagai wujud ke-Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah keutuhan nasional. 9. Hasil kajian tentang bentuk-bentuk partisipasi warga masyarakat yang mencerminkan komitmen persatuan dan kesatuan demi terwujudnya keutuhan nasional.			<u>persatuan, dimanapun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti sesama pengguna jalan, sesamekelompok pencita kendaraan tua, pencita sepeda kuno, harus saling menghormati, saling menghargai keberadaanya. Karena pada prinsipnya setiap warga NegaraIndonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama.</u> ❖ Perilaku hidup bertoleransi dalam keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bangsa Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Anak-anak yang cerdas adalah anak yang mampu menggunakan nalar secara maksimal, sedangkan anak kreatif merupakan anak yang memiliki limpahan ide untuk berbuat sesuatu dan anak terampil diwujudkan dalam sosok anak yang siap berbuat dan bekerja. Itu semua akan maksimal apabila anak Indonesia memiliki kesehatan yang prima. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan kita. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberadaan orang disekitarnya, dimanapun berada termasuk keberadaan di jalan raya. Perilaku menghargai dan toleransi akan menciptakan kerukunan, dan ketertiban berlalu lintas sama pengguna jalan. Hal ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 Ketentuan Umum, disebutkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.. ❖ Arti penting memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika oleh para pendiri negara dijadikan sebagai semboyan negara sebagaimana tertulis pada lambang negara Burung Garuda. Kebhinekaan yang ada pada diri

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					bangsa Indonesia merupakan ❖ Kebanggaan Menjadi Bangsa Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan. Wilayah Indone-sia tersebar di antara pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000, namun hal tersebut tidak menjadi-kan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal bangsa Indonesia telah mem-punyai landasan yang kuat, yaitu Pembukaan UUD 1945 alenia 2. Bangsa sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa sebesar jiwa atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Konsekuensinya kalau kita merasa bangsa sebagai bangsa Indonesia akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimana pun kita berada. Kita juga akan selalu meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman yang tersebar di

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					berbagai pulau besar dan kecil tidak men-jadikan bangsa Indonesia bercerai berai. Hal ini merupakan nilai tambah tersendiri yang menjadi kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Sekalipun bangsa Indonesia beraneka ragam, namun karena diikat oleh adanya kesamaan latar belakang sejarah, pengalaman, perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, keturunan, adat istiadat, dan bahasa yang diikat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indo-nesia maka tetap menjadikan bangsa Indonesia bersatu padu dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang pendidikan, ekonomi, transportasi, prasarana lalu lintas, jalan, guna menghnbun daerah satu dengan lainnya. <u>Dalam rangka menghubungkan dari satu dengan lainnya, pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan jalan. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. ❖ Bangga terhadap budaya dan Karya Bangsa Indonesia Negara Indonesia dikenal dengan bangsa yang banyak perbedaan, perbedaan dalam suku dan budaya. Bagi Indonesia perbedaan adalah pemersatu dalam kehidupan bersatu. Banyak negara yang rapuh dengan perbedaan. akan tetapi rapuhnya suatu negara di akibatkan atas ketidakmapanannya suatu pemerintahan dan sikap individu dalam berkehidup-andan hilangnya rasa cinta terhadap budayanya sendiri. Bagi kacang lupa kulitnya, yang dimaksud kita terkagum-kagumnya terhadap budaya lain kita sampai lupa akan kayanya budaya Indonesia yang dimana harus kita lestarikan untuk anak cucu cicit kita. Bagaimana cara kita agar dapat melestarikan budaya kita??? 1. kita harus menanamkan sikap cinta kita terhadap Indonesia dan sikap cinta kita terhadap Budaya kita. 2. belajar dan mempelajari Budaya-budaya Indonesia. 3. mengembangkan

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					(mempromosikan kepada dunia bahwa betapa menariknya budaya kita). 4. melestarikan Budaya yang sudah ada dan membangkitkan Budaya yang hampir punah. Disamping budaya, banyak karya yang dihasilkan oleh putra-putra Indonesia, Seperti Prof.Dr. Ir. Sedyatmo menemukan karya “Konstruksi Cakar Ayam” yang sekarang digunakan untuk pembangunan jalan raya, jalan tol. Kita bangga memiliki putra Indonesia yang mampu menciptakan konstruksi Jalan dengan system Cakar Ayam. Karena jalan merupakan bagian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 dinyatakan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Karena itu negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					<u>pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.</u> Banyak jalan raya, atau jalan tol, sekarang dibangun menggunakan konstruksi cakar ayam, disamping biaya lebih murah, bahan-bahan mudah didapat, seperti baja, semen, pasir, batu, dibanding jalan beraspal, dimana bahan tambang aspal semakin menipis dan tidak bisa diperbaharui. ❖ Manfaat persatuan dan kesatuan Dalam Kebhinnekaan. Tim Sepak Bola Nasional U-19 memerlukan kekom-pakan dan bekerjasama antar pemain yang rapi. Hal ini akan terwujud bila ada semangat persatuan dan kesatuan seluruh pemain dan sadar bahwa dirinya adalah duta bangsa Indonesia untuk mengharumkan Negara di dunia Internasional. Oleh karena tidaklah mudah menjaga persatuan dan kesatuan bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara ini tidak hanya terdiri atas satu golongan suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Agar tetap terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari kebhinnekaan, diperlukan sikap dan perilaku antara lain: (1) saling menghargai dan menghormati antar sesama. (2) menghindari konflik berusmber SARA, (3) saling membantu, (4) saling menolong, (5) Menghindari egoism, ekstremisme, chauvinisme dan fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya. Sedangkan manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah (1) memperkuat jati diri NKRI; (2) memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara; (3) memudahkan mencapai tujuan nasional (tertuang dalam pembukaan UUD 1945) hanya akan tercapai apabila semua warga negara terlibat mewujudkan tujuan nasional tersebut; (4) menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleransi, dan solidaritas dalam bingkai NKRI. <u>Salah satu manfaat persatuan dan kesatuan, adalah memudahkan</u>

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					pencapaian tujuan nasional diperlukan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sesuai dengan latar belakang dikeluarkan UU No. 22 Tahun 2009, yaitu bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ❖ Bentuk-bentuk toleransi dalam rangka memupuk persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, atau norma, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk sosial dan akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman-bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleransi berarti mena-han diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpen-dapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manu-sia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan Sesama apa pun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangannya. Bentuk perilaku toleransi antara lain adalah: a) tidak memotong pembicaraan orang lain b) memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, mengemukakan pendapat. c) membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. d) memberi kesempatan kepada kelompok minoritas untuk menyampaikan pendapat, usulan, pemikiran demi kebersamaan. e) tidak membunyikan radio, televisi, ataupun yang lain dengan suara keras.

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					f) tidak menggunakan knalpot sepeda motor dengan suara keras. <u>Dalam kehidupan berlalu lintas di jalanan juga diperlukan sikap toleransi, krena para menggunakan jalan raya, berasal dari berbagai suku, bangsa dan ras, serta pemeluk agama yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk toleransi dalam penggunaan jalan anatara lain: memberi kesempatan kendaraan yang ingin mendahului, tidak menggunakan knalpot yang dapat memekakan telinga, kendaraan yang besar mengalah ketika ada kendaraan yang lebih kecil mendahuluinya.</u> ❖ Pengamalan Pancasila dalam Wujud Sikap Toleransi Kalian tentu mengetahui latar belakang perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Perubahan tersebut dilakukan mengingat negara kita terdiri atas beragam perbedaan. Menghilangkan perbedaan dengan memak-sakan kehendak tentu bukan penyelesaian masalah yang tepat. Perbedaan harus disadari sebagai kekayaan bangsa dan negara. Perbedaan harus dapat diakomodasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kelas/ Smt	Demensi, Indikator dan Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Setiap KD	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Ke Materi Pembelajaran
					itulah sila pertama dalam Piagam Jakarta disepakati untuk diubah. Selain mampu menghargai perbedaan, kita juga harus mampu bertoleransi. Baik golongan mayoritas ataupun minoritas, yang kuat ataupun yang lemah, yang kaya ataupun yang miskin, memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak boleh ada satu pihak pun yang memaksakan kehendaknya. Kebebasan yang dimiliki pun tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengamalkannya.

B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus

KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 3.3 Memahami isi alinea	1. Mensukuri bahwa perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercapai atas berkat rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. 2. Mendeskripsikan	1. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Isi makna tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945. 3. makna kemerdekaan menggunakan <u>jalan raya menurut</u>	Mengamati • Membaca naskah Pembukaan UUD Negara Republik Tahun 1945 • Membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan Menanya Tanya jawab tentang : • Isi Proklamasi Kemerdekaan • Isi alinea Pembukaan UUD	• Jurnal harian penilaian sikap spiritual siswa kelas VII. • Observasi sikap perilaku dalam berdiskusi siswa kelas VII SMP/MTs.	2 x 3 JP	• Drs. Supandi, dkk, 2014 Buku <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas SMP/MTs</i>, Jakarta: Setdijten. Pendidikan Dasar, Kemdikbud, 2015.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menyaji hasil kajian isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menjelaskan isi makna tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945. 4. <u>Menjelaskan makna kemerdekaan menggunakan jalan raya menurut pasal 27 UUD 1945</u> 5. Menjelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 6. Menjelaskan dua materi dasar yang terkandung dalam UUD 1945.	<u>pasal 27 UUD 1945</u> 4. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 5. Dua materi dasar yang terkandung dalam UUD 1945. 6. Pasal pasal yang mengandung hubungan Negara dengan warga Negara menurut UUD 1945 7. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. 8. <u>Perilaku tidak semena-mena dalam mengendarai kendaraan bermotor sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945 (nilai</u>	NRI Tahun 1945 • Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengumpulkan Data • Mencari informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan tentang Nilai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mencari informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan tentang makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mencari informasi tentang makna alinea Pembukaan UUD 1945 • Mencari informasi	• Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pengetahuan isi alinea Pembukaan		• Drs. Salikum, dkk 2013, <i>Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII</i>, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusional untuk SMP dan MTs</i>. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • UUD Negara Republik Indonesia

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		7. Mengidentifikasi pasal-pasal yang mengandung hubungan Negara dengan warga Negara menurut UUD 1945 8. Mendeskripsikan hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. 9. <u>Menunjukkan perilaku tidak semena-mena dalam mengendarai kendaraan bermotor sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945 (nilai kebersamaan).</u> 10. <u>Menampilkan perilaku adil dalam menggunakan jalan raya sebagai wujud</u>	<u>kebersamaan).</u> 9. <u>Perilaku adil dalam menggunakan jalan raya sebagai wujud pelaksanaan Sila ke 5 Pancasila Dasar Negara Pancasila. (nilai komitmen)</u> 10. Alasan bahwa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR. 11. <u>Sikap perilaku keteguhan hati untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena sebagai hukum dasar tertinggi di NKRI. (komitmen)</u> 12. Membuat laporan tertulis hasil kajian terhadap isi alinea pembukaan UUD 1945.	sumber dan mendiskusikan tentang isi Proklamasi kemerdekaan Mengasosiasi • Menganalisis hubungan makna antaralinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Menghubungkan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Menyimpulkan arti penting mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengomunikasikan • Mempresentasikan tentang isi	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Tahun 1945 • Materi Sosialisasi UUD 1945 oleh Sekjen. MPR RI, 2004 • Referensi/Internet sesuai materi pokok

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<u>pelaksanaan Sila ke 5 Pancasila Dasar Negara Pancasila. (nilai komitmen)</u> 11. Menjelaskan alasan bahwa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR. 12. <u>Menunjukkan sikap perilaku keteguhan hati untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena sebagai hokum dasar tertinggi di NKRI.</u> 13. <u>Membuat laporan tertulis hasil kajian terhadap isi alinea pembukaan UUD 1945.</u>		Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyusun komitmen melalui ikrar, janji, atau tekad untuk tidak merubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
2	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa	1. Menyukuri atas terciptanya	1. Pengertian norma 2. Arti pentingnya	Mengamati Menyimak	Portofolio, penilaian ini	2 x 3 JP	Drs. Supandi,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 2.2 Menghargai perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar 3.4 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4.4 Menyaji hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.	keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. 2. Menjelaskan pengertian norma 3. Menjelaskan arti pentingnya norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. <u>Menjelaskan arti pentingnya mentaati peraturan, tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan (nilai Komitmen)</u> 4. <u>Mentaati terhadap ketentuan atau norma-norma berlaku lintas dilingkungan sekitarnya (nilai disiplin)</u>	norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. <u>Arti pentingnya mentaati peraturan, tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan (nilai Komitmen)</u> 3. <u>Taat terhadap ketentuan atau norma-norma berlaku lintas dilingkungan sekitarnya (nilai disiplin)</u> 4. Fungsi norma di masyarakat. 5. Pentingnya mentaati mentaati terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat 6. Macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 7. <u>Atran/norma tentang rambu-rambu</u>	penjelasan guru tentang peristiwa berkaitan norma dalam masyarakat • Mengamati gambar masalah sosial berkaitan dengan norma seperti kemacetan lalu lintas, pencurian, dan sebagainya. Menanya • Menyusun pertanyaan tentang pengertian dan macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Melakukan wawancara dengan berbagai pihak berkaitan dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pengetahuan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan		dkk, 2014 Buku <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas SMP/MTs</i>, Jakarta: Setdijten. Pendidikan Dasar, Kemdikbud, 2015. • Drs. Salikum, dkk 2013, <i>Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII</i>, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusional untuk</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		5. Menjelaskan fungsi norma di masyarakat 6. Menjelaskan pentingnya mentaati terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. 7. Mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 8. Mengidentifikasi aturan/norma tentang rambu-rambu larangan, perintah an petunjuk minimal 5 buah (nilai disiplin)	rambu larangan, perintah an petunjuk minimal 5 buah (nilai disiplin) 8. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran norma yang berlaku. 9. Sanksi yang diterima akibat pelanggaran lalu lintas. 10. Sifat norma hukum dengan norma sopan santun. 11. Sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 12. Perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat termasuk UU No. 22 Tahun 2009 13. Laporan hasil observasi perilaku menyimpang terhadap norma yang berlaku	Mengumpulkan Data • Mencari informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan tentang pengertian dan macam norma • Mengumpulkan data tentang contoh berbagai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Mengasosiasi • Mengkaji dan menyimpulkan hubungan antarnorma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Mengkomunikasikan • Mempresentasikan hasil pengamatan norma yang	bernegara • Pengamatan n, penilaian ini merupakan penilaian proses untuk menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran an dan simulasi norma yang berlaku • Jurnal, untuk mencatat dan menilai pembiasaan terhadap norma yang berlaku		<i>SMP dan MTs.</i> Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Materi Sosialisasi UUD 1945 oleh Sekjen. MPR RI, 2004 • Referensi/Internet sesuai materi pokok

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa	lintas (nilai keadilan) 11 Membedakan sifat norma hukum dengan norma sopan santun. 11. mendeskripsikan sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 13 <u>Melaksanakan observasi perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku.</u> termasuk UU No. 22 Tahun 2009 14 Melaporkan hasil observasi perilaku menyimpang terhadap norma yang berlaku di masyarakat melalui tayangan .	melalui tayangan	berlaku melalui tulisan, gambar, film, dan sebagainya Mensimulasikan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara			
		1. Menyukuri bahwa semangat	1. Pentingnya pemahaman	Mengamati Mengamati	Portofolio, penilaian ini	4 x 3 JP	Drs. Supandi,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 2.4 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.5 Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI 4.5 Menyaji hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI. 2. Memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI 3. Peran daerah dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Karakteristik potensi sumber daya daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan peran daerah dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia.	daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari NKRI. 2. Pentingnya kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI 3. Peran daerah dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Karakteristik potensi sumber daya daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	gambar monumen perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan • Mengamati gambar/film peristiwa Proklamasi kemerdekaan • Mengamati naskah Proklamasi Kemerdekaan • Menyimak penjelasan guru tentang gambar/film Menanya • Tanya jawab peristiwa perjuangan mendirikan NKRI • Merumuskan pertanyaan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan • Mengumpulkan Data • Mencari informasi	digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang sejarah berdiri NKRI • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pengetahuan sejarah berdiri NKRI. • Pengamatan, penilaian ini merupakan penilaian proses untuk menilai		dkk, 2014 Buku <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas SMP/MTs</i>, Jakarta: Setditjen. Pendidikan Dasar, Kemdikbud, 2015. • Drs. Salikum, dkk 2013, <i>Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII</i>, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		Indonesia. 4. Mengidentifikasi karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa 6. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya 7. Contoh keteladanan perilaku kerukunan sesama pengguna jalan di lingkungan di sekitar 8. Contoh perilaku positif agar tidak terjadi konflik antar teman sebaya/daerah demi terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungannya. 9. Memberi perilaku	5. <u>Upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa</u> 6. <u>Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya.</u> 7. <u>Contoh keteladanan perilaku kerukunan sesama pengguna jalan di lingkungan di sekitar</u> 8. <u>Contoh perilaku positif agar tidak terjadi konflik antar teman sebaya/daerah demi terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungannya.</u> 9. <u>Memberi</u>	dari berbagai sumber dan mendiskusikan perjuangan mendirikan NKRI • Mencari informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan makna Proklamasi Kemerdekaan • Mencari informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan makna NKRI Mengasosiasi • Mengkaji hubungan berbagai informasi tentang perjuangan mendirikan NKRI • Mengkaji hubungan berbagai informasi tentang Proklamasi Kemerdekaan • Menyimpulkan arti penting	perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta sosiodrama		<i>SMP dan MTs.</i> Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Materi Sosialisasi UUD 1945 oleh Sekjen. MPR RI, 2004 • Referensi/Internet sesuai materi pokok

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		kerukunan sesama pengguna jalan di lingkungan disekitar (nilai kebersamaan). 8. Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya. 9. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain. 10. Menyatakan diri bahwa tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. Menampilkan peran serta warga masyarakat di	kesempatan kepada pengendara lain yang ingin mendahului sesama pengguna jalan demi kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain 10. Menyatakan diri bahwa tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. Peran serta warga masyarakat di daerahnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan serta ketertiban bersama dalam berlalu lintas 12. Ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 13. Presentasi hasil	mempertahankan NKRI Mengkomunikasikan • Mempresentasikan hasil telaah sejarah berdiri NKRI melalui display/tulisan/bahan tayang. • Menampilkan sodiodrama peristiwa Proklamasi Kemerdekaan			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<u>daerahnya</u> <u>dalam menjaga</u> <u>keamanan dan</u> <u>keselamatan</u> <u>serta ketertiban</u> <u>bersama dalam</u> <u>berlalu lintas</u> 12. Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 13. Mempresntasikan hasil kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI.	kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI				
4	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku,	1. Menyukuri adanya keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender.dari TYME merupakan kekayaan yang tak ternilai	1. <u>Keberagaman</u> suku, agama, ras, budaya dan gender.dari TYME merupakan <u>kekayaan yang tak ternilai</u> 2. Sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar	Mengamati - Mengamati keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam masyarakat - Mengamati peristiwa interaksi dengan teman	Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan individu maupun	4 x 3 JP	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	agama, ras, budaya, dan gender 3.6 Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 4.6 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	2. Menunjukkan sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. 3. <u>Memberi bantuan</u> <u>terhadap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas</u> <u>terhadap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas (nilai peduli)</u> 4. <u>Menampilkan sikap perilaku memberi kesempatan bagi penveberang jalan (peduli)</u> 6. Menampilkan diri saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. <u>Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman terhadap</u>	dan intern umat beragama. 3. <u>Memberi bantuan terhadap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas</u> 4. <u>Sikap perilaku memberi kesempatan bagi penveberang jalan</u> 6. Pentingnya saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. <u>Sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman terhadap sesama pengguna jalan yang bergaman suku, agama, ras dan status social.</u> 8. <u>Sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban,</u>	dan orang lain yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat Menanya - Merumuskan pertanyaan berkaitan keberagaman masyarakat Indonesia, seperti apa perbedaan dan persamaan, mengapa berbeda, dan sebagainya - Menyusun pertanyaan dengan berkaitan dengan peristiwa seperti siapa, apa, kapan, bagaimana, mengapa interaksi terjadi. Mengumpulkan Data - Mencari informasi dari berbagai sumber belajar dan	kelompok tentang keberagaman masyarakat Indonesia - Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pengetahuan keberagaman masyarakat Indonesia - Pengamatan, penilaian ini merupakan penilaian proses untuk menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam		- Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 - Referensi/Internet sesuai materi pokok - Lingkungan masyarakat - Tokoh budaya, suku, agama

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		sesame pengguna jalan yang bergaman suku, agama, ras dan status social. 8. <u>Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan</u> 9. <u>Mengidentifikasi factor penghambat dalam menciptakan kerukunan dalam kamjemukan di daerah tempat tinggal di sekitarnya.</u> 10. <u>Menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang beragam.</u> 11. <u>Mempres-</u>	sesame pengguna jalan 9. <u>Factor penghambat dalam menciptakan kerukunan dalam kamjemukan di daerah tempat tinggal di sekitarnya.</u> 10. <u>Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang beragam.</u> 11. <u>Presentasikan hasil observasi keberagaman penggunaan jalan ditinjau dari pengguna, jenis kendaraan, dan perilaku pengguna jalan.</u>	mendiskusikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia • Mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber dan wawancara untuk menjawab pertanyaan berkaitan peristiwa interaksi sosial Mengasosiasi • Mengkaji hubungan berbagai informasi tentang keberagaman masyarakat Indonesia • Meyimpulkan arti penting keberagaman dalam masyarakat Indonesia • Menyimpulkan arti penting sikap toleransi dalam masyarakat	proses pembelajaran, • Penilaian teman sejawat untuk menilai sikap interaksi sosial • Projek, digunakan untuk penilaian kegiatan pentas budaya/pameran budaya		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<u>sentasikan hasil observasi keberagaman penggunaan jalan ditinjau dari pengguna, jenis kendaraan, dan perilaku pengguna jalan.</u>		Indonesia yang beragam Mengomunikasikan - Menyusun laporan dan mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia - Menampilkan keanekaragaman masyarakat Indonesia melalui pameran/pentas budaya			
5	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 2.3 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 3.7. Memahami pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	1. Mensyukuri bahwa ke <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> yang ada di Indonesia merupakan anugrah TYME, karena harus tetpa dijaga dan dilestarikan, 2. Menjelaskan pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>.	1. Pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> 2. Arti penting semboyan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> bagi bangsa Indonesia. 3. <u>Arti pentingnya saling menghargai bagi pengguna jalan yang beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya</u>	Mengamati - Membaca peristiwa keanekaragaman masyarakat dalam <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> - Mengamati kehidupan yang dilandasi persatuan dan kesatuan Menanya - Merumuskan pertanyaan	- Jurnal harian untuk menilai sikap spiritual - Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu	4 x 3 JP	- Drs. Supandi, dkk, 2014 - Buku <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas SMP/MTs</i>, Jakarta: Setditjen. Pendidikan Dasar, Kemdikbud, 2015.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	4.7 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	3. Mendeskripsikan arti penting semboyan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> bagi bangsa Indonesia. 4. Menjelaskan arti pentingnya saling menghargai bagi penggunaan jalan yang beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya 5. Memiliki kesadaran bahwa penggunaan jalan raya berasal dari berbagai keberagaman suku, ras, agama dan budaya 6. Menunjukkan contoh partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional. 7. Mengidentifikasi	4. Kesadaran dalam dirinya bahwa penggunaan jalan raya berasal dari berbagai keberagaman suku, ras, agama dan budaya 5. Bentuk-bentuk partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional. 6. Bentuk-bentuk partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	berkaitan dengan hasil pengamatan dikaitkan dengan Semboyan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> Mengumpulkan Data • Mencari informasi dan mendiskusikan tentang makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> Mengasosiasi • Mengkaji hubungan berbagai informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> • Menyimpulkan arti penting semboyan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> • Menyusun laporan dan	maupun kelompok tentang makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pengetahuan keberagaman masyarakat Indonesia serta pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> • Pengamatan, penilaian ini merupakan penilaian proses untuk		• Drs. Salikum, dkk 2013, <i>Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII</i>, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • UUD Negara Republik Indonesia

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		contoh bentuk- bentuk <u>partisipasi</u> <u>kewarganegaraan</u> <u>sebagai</u> <u>pencerminan</u> <u>komitmen</u> <u>terhadap dalam</u> <u>berlalu lintas</u>		mempresentasikan hasil telaah tentang makna Bhinneka Tunggal Ika Menyusun aksi kegiatan sosial sebagai perwujudan partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap kutuhan nasional, seperti menolong teman yang sedang tertimpa musibah, menolong anggota masyarakat yang membutuhkan, dan sebagainya.	menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Projek untuk menilai kegiatan partisipasi kewarganegaraan		Tahun 1945 - Materi Sosialisasi UUD 1945 oleh Sekjen. MPR RI, 2004 - Referensi/Internet sesuai materi pokok

C Model Pengintergrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah	: SMP Malang
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: VII/satu
Materi Pokok	: Karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI
Alokasi Waktu	: 2 x 3 JP (2 pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat
2.1 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
3.5 Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI.
4.5 Menyajikan hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI.
4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
Pertemuan 1 1. Mensyukuri bahwa semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI. 2. Memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI 3. Menjelaskan peran daerah dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mengidentifikasi karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. <u>Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa</u> 6. <u>Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya</u> Pertemuan 2 7. <u>Menunjukkan contoh perilaku kerukunan sesama pengguna jalan dilingkungan disekitar</u> 8. Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya. 9. <u>Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain</u> 10. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. <u>Menampilkan peran serta warga masyarakat di daerahnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan serta ketertiban bersama dalam berlalu lintas di daerah tempat tinggalnya.</u> 12. Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik sumber daya alam di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 13. Mempresentasikan hasil kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI.

D. MATERI PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

1. Pentingnya pemahaman daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari NKRI.
2. Pentingnya kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI
3. Peran daerah dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Karakteristik potensi sumber daya daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
6. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya.

Pertemuan 2

7. Contoh keteladanan perilaku kerukunan sesama pengguna jalan dilingkungan di sekitar
8. Contoh perilaku positif agar tidak terjadi konflik antar teman sebaya/daerah demi terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungannya.
9. Memberi kesempatan kepada pengendara lain yang ingin mendahului sesama pengguna jalan demi kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain
10. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI.
11. Peran serta warga masyarakat di daerahnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan serta ketertiban bersama dalam berlalu lintas
12. Ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI
13. Presentasi hasil kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI

PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA PPKn SMP/MTs KELAS VII. (SEBAGAI BAHAN AJAR UNTUK SISWA/PESERTA DIDIK)

- Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang(Pasal 25A) **.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas karakteristik Negara Indonesia terdiri atas pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang hingga Mearauke.sebanyak 13.466 pulau. Menurut konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS'82) pasal 121 mendefinisikan pulau sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi.(Hasil Survei Tahun 2013). Perlu ditambahkan bahwa luas daratan **Indonesia sebesar 1.910.000 km2 dan** luas lautan 6.279.000 km2. Berdasarkan karakteristik NKRI yang begitu luas tersebut, diperlukan sarana jalan dan pengaturannya. Kondisi seperti itu, maka jalan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berupa jalan darat, air dan udara, guna menjangkau antar pulau dan antar daerah daratan.

- **Daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI**

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang(Pasal 25A) **

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]



Selanjutnya lihat dan amati dalam peta Indonesia, amati daerah tempat tinggal termasuk di daerah Kecamatan/distrik mana? Kab/Kota dan provinsi mana? Apa artinya itu? Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri atas wilayah kecamatan, kabupaten/kota, provinsi. Di masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda-beda, dan dihubungkan oleh sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Karena itulah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

► Arti penting daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [UUD 1945 Pasal 18 (1)**]. Lihatlah peta Indonesia, Anda bertempat di Provinsi dan kabupaten atau kota mana? Dimanapun Anda berada, yang kalian tempati adalah wilayah NKRI. Sebuah Negara yang besar dan luas, jumlah penduduk kurang lebih sekitar 240 juta, luas wilayah daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km². NKRI merupakan yang besar, beraneka ragam suku, agama, budaya, bahasa, ras, pekerjaan, mata pencaharian dan lain sebagainya. Namun yang membanggakan ketika proses perubahan UUD Negara Republik

Indonesia MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat bersepakat tetap mempertahankan NKRI. Daerah yang begitu luas, perlu diperlu-kan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu untuk menghubungkan semua wilayah di daratan (UU No. 22 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1), agar terwujudnya keamanan, keselamat-an, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah diperlukan aturan yang disebut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

► **Ciri-ciri/karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI**

Yang dimaksud daerah tempat tinggal adalah Daerah tempat tinggal adalah daerah yang kita tempati dalam salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. Menurut UUD 1945 disebutkan NKRI terdiri atas daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten atau kota. Antar daerah provinsi, kabupaten dan kota serta daerah yang lebih kecil seperti kecamatan, desa diperlukan sarana jalan. Dengan dibukanya jalan dinamika perekonomian di daerah semakin meningkat. Setiap keberadeaan jalan diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasa. (UU N0. 22 Tahun 2009 pasal 5 ayat (2). Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda seperti nama, luas, budaya, sejarah, kesenian khas, makanan khas, dan potensi daerah. Daerah-daerah tersebut sangat penting, karena NKRI tidak akan berdiri tegak dan kukuh tanpa didukung oleh daerah. Karena keberadaan daerah sangat penting bagi NKRI. Di dalam menjalankan roda pemerintahan, dan mendukung pembangunan serta integritas nasional diperlukan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Karena itu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan inte-grasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana-na diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Misalnya Kabupaten malang memilik potensi sumber daya alam yang luar biasa, disamping daerah agraris, juga memiliki potensi sumber daya alam perikanan. Potensi pesisir Sendang Biru yang paling menonjol adalah potensi perikanannya, khususnya jenis tuna dan cakalang. hasil tangkapan tuna dan cakalang didaratkan di TPI Pondok Dadap oleh nelayan setempat maupun nelayan dari luar daerah dan dipasarkan sampai ke luar propinsi Jawa Timur.

Tempat lain yang dapat dijadikan tujuan wisata di daerah Sendang Biru Malang Selatan antara lain adalah : area hutan yang berada di sepanjang pantai Sendang Biru, dimana banyak digunakan untuk melakukan perkemahan bagi pelajar dan keberadaan pulau Sempu yang ada tepat diseberang pantai Sendang Biru dan banyak dikunjungi wisatawan. Dari ketiga tempat tersebut wisatawan

dapat mengunjungi setiap harinya dengan menikmati indahnya lokasi Wisata yang ada di Sendang Biru Malang Selatan. Untuk menuju ke daerah Sendang Biru, jalan yang harus dilalui adalah jalan menanjak dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam dari kota Malang ke arah selatan. bagi wisatawan yang menginginkan alternatif tempat wisata, tentunya Sendang Biru Malang Selatan dapat digunakan sebagai tujuan wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi.

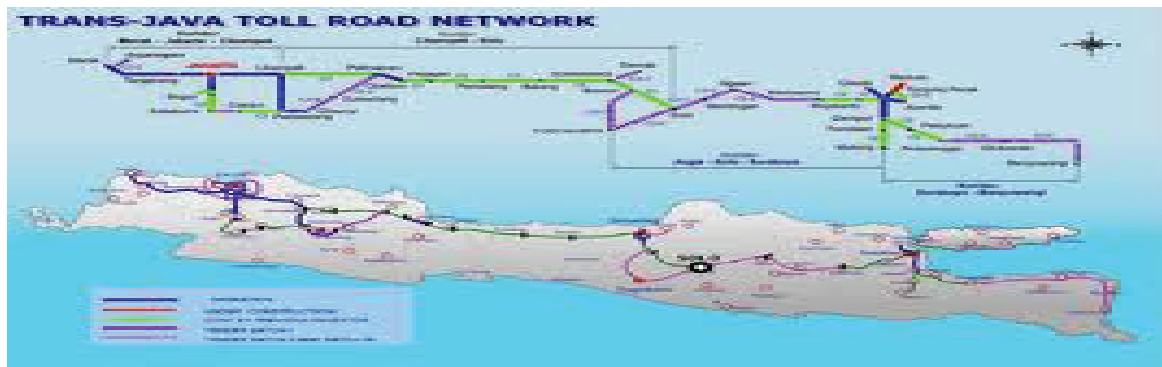


Gbr. Pantai Sendang Biru dan Tempat Pelalangan Ikan Sedang Biru Malang Selatan

Sumber: <http://pusatstudisumberdayapesisirlaut.blogspot.com/2014/03/potensi-pesisir-sendang-biru-malang.html>

► **Upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab).**

Untuk tetap tegaknya dan utuhnya NKRI, diperlukan partisipasi aktif setiap warga Negara. Upaya menjaga keamanan lingkungan harus didasarkan semangat persatuan dan kesatuan, baik lingkungan social maupun fisik. Bentuk partisipasi warga untuk mewujudkan keamanan lingkungan social seperti selalumenjaga kerukunan, gotong royong, saling menghargai, saling membantu, di antara warga. Sedangkan untuk menjaga lingkungan fisik, seperti peduli terhadap kerusakan lingkungan, menjadi anggota TN/POLRI, penjaga mercusuar, penjaga perbatasan, melestarikan lingkungan hutan, melestarikan sumber daya air, menjaga kelestarian flora dan fauna. Sedangkan untuk mewujudkan keamanan lingkungan dalam berlalu lintas diperlukan sikap perilaku tertib, saling menghargai bagi sesama pengguna jalan, selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas. Karena Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah . Jalan memiliki peran yang penting dan strategis. Dimana letak strtegisnya suatu jalan dan dimana letak peran penting dari jalan raya?Amati gambar di bawah ini.



Gbr. Jalan Daendels dari Anyer hingga Panarukan

► **Bentuk-bentuk partisipasi secara aktif untuk menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal.**

Bentuk partisipasi warga untuk menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal dapat berupa berbagai macam aktivitas, antara lain kerjabakti bersih-berish lingkungan, melakukan penghijauan di tepi jalan, potisasi, lampunisasi jalan, pengecatan pagar jalan, berish-bersih sampah di sekitar tempat tinggal, Sedangkan bentuk partisipasi warga masyarakat untuk keindahan lingkungan jalan antara lain penanaman pohon penghijauan, pemasangan lampu penerang, memberishkan parit jalan, memperbaiki jalan yang berlobang, mengambil atau menyingkirkan benda di jalan yang bisa membahayakan keselamatan berlalu lintas.

► **Penampilan perilaku persatuan dan keksatuan dilingkungan sekitar.**

NKRI adalah harga mati. Itulah kesepakatan seluruh anggota MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945 tahun 1999. Untuk mengisi kesepakatan tersebut, diperlukan perilaku yang mengarah terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Utamanya ketika berinteraksi dengan orang lain di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara, termasuk di lingkungan sesama pengguna jalan. Sikap perilaku yang diperlukan bagi sesame pengguna jalan antara lain saling menghargai sesame pengguna jalan, memberi kesempatan bagi penyeberang jalan, memberi kesempatan bagi pengendara yang ingin mendahului, tidak menggunakan kenalpot yang memekakkan telinga, sopam dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dengan penampilan sikap perilaku di jalan seperti itu akan terwujud persatuan dan kesatuan, yang akhirnya tercipta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 Ketentuan Umum, yakni ketertiban Lalu Lintas dan Angkut-an Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

[illegible]

► Kesadaran untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya.

► Kerukusan di lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai bagian utuh dari terciptanya NKRI.

88
Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII

memang terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak menutup kemungkinan sumber konflik berawal di jalan, sesama pengguna jalan. Agar tetap terpelihara kedamaian, kerukunan, maka sebaiknya konflik harus dihindari. Misalnya ketika menyalip kendaraan lain, orang tersebut merasa tersinggung. Oleh karena itu sikap sabar dalam berkendara memang sangat diperlukan. Yang lebih penting, di dalam pasal 1 ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2009, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

► **Kesadaran diri bahwa tempat tinggalnya merupakan bagian dari keutuhan wilayah NKRI.**

Pada hal dalam UUD 1945 pasal 33 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]

Setelah munculnya undang-undang otonomi daerah, ada tuntutan daerah bahwa sumber daya alam dikelola sepenuhnya oleh daerah yang bersangkutan. Pada hal dalam UUD 1945 telah mengatur hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18A (2)**].

Demikian juga hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 7 ayat (1) dinyatakan “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.”. Dengan demikian daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di daerahnya masing-masing. Karena pada dasarnya daerah merupakan bagian pemerintah pusat sebagai penyelenggara pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu Anda Tahu!

Peristiwa Lakalantas di Polres Malang Turun 30 Persen

[Rabu, 04 Desember 2013 16:35:58 : Brama Yoga Kiswara]

MALANG (beritajatim.com) - Sosialisasi program santun dan tertib dalam berkendara di jalan raya menuai hasil manis. Dari data yang dimiliki Satuan Lalu-Lintas Polres Malang, angka kecelakaan lalu-lintas di wilayah ini cenderung menurun.

Keberhasilan menekan angka kecelakaan hingga berujung korban jiwa tak lepas dari beberapa program kerja yang dilakukan petugas di wilayah tersebut.

"Salah satu terobosan kami, memberikan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) pada masyarakat di daerah rawan lakalantas," ungkap Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Malang, AKP Dwi Sumrahadi Rukhmanto, Rabu (4/12/2013) siang.

Menurut Dwi, PPGD yang digelar Satlantas berada di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Lokasi Genengan dipilih sebagai daerah rawan kecelakaan. "Ada jalur Black Spot di Jalan Raya Genengan sampai Jalan Raya Pepen, Kecamatan Kepanjen," urainya.

Dwi melanjutkan, fungsi PPGD adalah, melatih masyarakat tanggap dalam memberikan pertolongan pertama saat kecelakaan terjadi. Fungsi utama, memberikan pertolongan secepat mungkin dan meminimalisir fatalitas pada korban kecelakaan.

"PPGD dilatih untuk meminimalisir jumlah korban. Sebagai contoh, jika seseorang luka parah, secepatnya harus dapat pertolongan. Yang tadinya luka berat, otomatis bisa terselamatkan," papar Dwi.

Sejauh ini, tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di Jalan Raya Genengan, Jalan Raya Pepen dan Jalan Raya Mojosari karena kondisi jalan memang tidak terlalu lebar. Klasifikasi jalan ditempat itu sebenarnya masuk jalan negara. Namun, lebar secara keseluruhan masih dibawah 11 meter.

Adapun angka kecelakaan lalu-lintas sepanjang Januari sampai 30 Nopember 2013, terjadi lakalantas sebanyak 511 kasus. Jumlah luka ringan mencapai 756 dan korban meninggal dunia mencapai 100 jiwa.

Bandingkan dengan angka kecelakaan lalu-lintas sepanjang Januari-Desember 2012 lalu. Dimana tahun lalu ada 623 kecelakaan. Jumlah korban luka ringan 876 dan korban meninggal dunia 140 jiwa. "Jika dilihat grafik program kerja cukup berhasil. Angka kecelakaan menurun termasuk menekan jumlah korban jiwa sampai 30 persen," terang Dwi. [yog/kun] (Sumber: <https://id-id.facebook.com/Kojatim/posts/516525881778845>

ketahui jatim terkini, sukai Komunitas Orang Jawa Timur

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

A. Kegiatan Pendahuluan

1. Mengajak peserta didik untuk bersyukur dan berdoa kepada TYME, bahwa semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI.
2. Memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI

3. Guru mengajak peserta didik bernyanyi “Nyiur Hijau “

- Nyiur hijau, ditepi pantai
- Siat siut daunnya melambai
- Padi mengembang, kuning merayu
- Burung-burung bernyanyi gembira
- Tanah airku, tumpah darahku
- Tanah yang subur, kaya makmur
- Tanah airku, tumpah darahku
- Tanah yang indah permai nyata.

4. Menginformasikan indicator pencapaian kompetensi pembelajaran yang akan dicapai

5. Menginformasikan relevansi bahan ajar yang kan disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan peserta didik

6. Melaksanakan tes awal secara lisan

B. Kegiatan Inti

1. Amati bahan tayang berikut ini, kemudian bacalah BAHAN AJAR terlampir. .(mengamati)

2. Amati gambar peta di daerah masing-masing (Peta Jawa dan Kabupaten Malang), dan identifikasi sumber daya alam daerah masing-masing (misalnya Kab. Malang), ciri dan potensi daerah dan rambu-rambu lalu lintas serta pentingnya sarana jalan dan angkutan untuk menghubungkan daerah satu dengan lainnya..(mengamati)



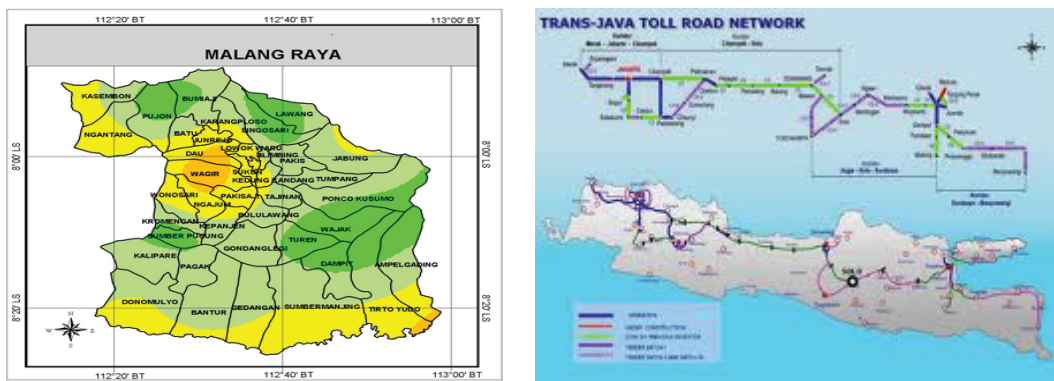
Gbr. Pantai Sendang Biru dan Tempat Pelalangan Ikan Sedang Biru Malang Selatan

Sumber: <http://pusatstudisumberdayapesisir laut.blogspot.com/2014/03/potensi-pesisir-sendang-biru-malang.html>



Peta Kab. Malang, Perkebunan Coklat, Apel, Jeruk,

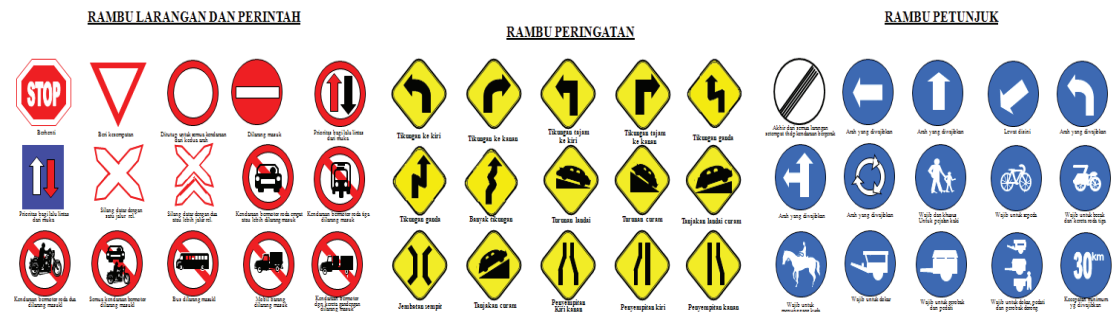
Semua potensi sumber daya alam di daerah Anda, merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kelola untuk kesejahteraan rakyat. Potensi sumber daya alam tidak bisa dinikmati oleh orang banyak, kalau tidak didistribusikan ke daerah lain yang kurang memiliki sumber daya alam tersebut. Karena itu diperlukan sarana jalan dan transportasi angkutan jalan.



Gbr. Peta Jalan yang menghubungkan daerah-daerah lain di Jawa dan Peta Jalan di Malang Ray

3. Mengidentifikasi peran jalan sebagai sarana lalau lntas dan angkutan jalan demi kesejahteraan pembangunan nasional
 Peran jalan sangat penting untuk mendistribusikan hasil sumber daya aam di daerahnya ke daerah lain, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena pembangunan infrastrukut berupa jalan sangat strategis.Disinilah diperlukan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta suasana jalan yang aman, lancar, tertib dan aman. Setiap jalan umum yang dilalau oleh kendaraan umum diperlukan rambu-rambu lalau lintas guna memberi petunjuk bagi pengguna jalan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas.
4. Peserta didik dibagi atas beberapa kelompok kecil (3- 4 orang)

- Setelah membaca bahan ajar dan mengamati gambar, ciri-ciri khas/karakteristik daerah tempat tinggal dan mengamati serta mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas, setiap kelompok diminta untuk membuat pertanyaan yang belum dipahami sebanyak-banyaknya dari bacaan dan gambar serta makna rambu-rambu lalu lintas (*questioning*)



- Setelah tersusun sejumlah pertanyaan, peserta didik dalam berkelompok diminta untuk menggali data, mencari atau mengumpulkan sejumlah informasi, untuk mencari jawaban dari pertanyaan dibuatnya (pengumpulan data/informasi)
- Tiap kelompok berdaarkan pertanyaan yang disusun, diminta untuk memikirkan atau mencari pemecahan masalah (menalar)
- Guru menugaskan tiap kelompok untuk menyusunla poran hasil penugasan yang telah dibuat dan mempreentasikan di depan kelas. (mengkomunikasikan).
- Setiapkelompokmempresentasikanhasilkerja yang telahdiselesaikan dan menyimpulkan hasil pemeahanan masalahan (menyimpulkan) selanjutnya kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan (membuat jejaring)

C. Kegiatan Penutup.

- Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran hari dan merangkum
- Post test dilakukan secara lisan dalam bentuk esey dari petemuan pertama.
- Guru memberikan tugas tindak lanjut, untuk melakukan identifikasi karakteristik potensi sumber daya alam, rambu-rambu lalu lintas yang ada, memberikan makna masing-masing rambu-rambu lalu lintas yang ditemukan, serta memberikan penjelasan peran jalan di daerah demi kesejahteraan masyarakat.
- Guru meminta minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan di depan kelas.
- Guru menutup pelajaran dengan salam.

Pertemuan 2

A Kegiatan Pendahuluan

- Mengajak peserta didik untuk bersyukur dan berdoa kepada TYME, bahwa semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina di lingkungan daerah tempat tinggalnya menuju keutuhan NKRI.
- Menghargai keberagaman warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI
- Guru mengajak peserta didik bernyanyi “ Indonesia Pusaka “

INDONESIA PUSAKA

- Indonesia tanah air beta
- Pusaka abadi nan jaya
- Indonesia sejak dulu kala
- Slalu dipuja puja bangsa.
- Disana tempat lahir beta
- Dibuai dibesarkan bunda
- Tempat berlindung di hari tua
- Tempat akhir menutup mata

- Guru menginformasikan bahwa hari ini melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu
- Sebelum pertemuan 2 dilanjutkan, guru meminta siswa untuk melaporkan hasil observasi terhadap ciri-ciri khas/karakteristik daerah tempat tinggal Anda, sesuai dengan tugas yang diberikan minggu yang lain.
- Pengecekan tugas yang dikumpulkan dan mencatat kelompok yang tidak mengumpulkan (penilaian sikap tanggung jawab)

B Kegiatan Inti

- Buka Bahan Ajar Untuk Pertemuan 2 yang dibagikan Bapak/Ibu Guru dan buku paket PPKn Kelas VII (mengamati)
- Cermati gambar dan bacaan dan catatlah hal-hal yang kalian anggap penting dan bermanfaat bagi kalian (mengamati).
- Buatlah pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin dari hal-hal yang belum kalian fahami, misalnya terkait dengan hal-hal berikut ini: (menanya)
 - Bentuk-bentuk partisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya (nilai kepedulian).
 - Perilaku kerukunan sesama pengguna jalan dilingkungan disekitar (nilai kebersamaan).
 - Upaya untuk mencegah konflik dimasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar teman sebaya.
 - Kesadaran diri bahwa tempat tempat termasuk potensi sumber daya alam di darahnya merupakan bagian dari wilayah NKRI.

- Contoh Perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai embrio terciptanya kerukunan nasional dalam wadah NKRI
 - Bentuk-bentuk perilaku rukun sesama pengguna jalan sebagai embrio terciptanya keselamatan berlalu lintas dalam wadah NKRI
- d. Carilah data, informasi yang kalian perlukan untuk menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Anda bebas mencari sumber data/informasi, baik ke perpustakaan, atau internet, atau sumber lain yang relevan dengan jeda waktu 15 menit. (mengumpulkan informasi)
 - e. Lakukan diskusi untuk memecahkan pertanyaan yang Anda ajukan, dan masing-masing kelompok mempersiapkan untuk dipresentasikan. (mengasosiasi/mengolah data atau informasi atau proses menalar)
 - f. Tayangkan/laporkan di depan kelas hasil kerja kalian (mengkomunikasikan).
 - g. Kelompok lain silahkan memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi teman kalian (membuat jejaring/networking).
 - h. Buatlah rencana aksi demi menjaga kelestarian potensi alam yang ada di daerah kalian, dan rencana aksi terkait keselamatan berlalu lintas. (mencipta, tindakan nyata)
- C. Kegiatan Penutup
- a. Melakukan refleksi dengan meminta pendapat peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang telah dialami.
 - b. Bersama peserta didik membuat kesimpulan/penguatan tentang materi ajar yang telah disajikan selama pembelajaran
 - c. Melakukan Post test.
 - d. Menugaskan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok kecil untuk melakukan kajian sumber daya alam yang terdapat di daerah tinggalnya.
 - e. Mengajak peserta didik untuk bernyanyi Indonesia Tanah Airku.
 - f. Setelah selesai diakhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

F. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN

1. Teknik Penilaian

- a. Penilaian sikap dengan teknik observasi, yaitu menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi menggunakan daftar cek.
- b. Penilaian pengetahuan dengan teknik tes tertulis bentuk uraian/essay

- c. Indikator 3 = ketika berdoa dengan sikap sungguh-sungguh (skor 1 = tidak sungguh-sungguh, 2= cukup sungguh-sungguh, 3 = sungguh-sungguh, 4 = sangat sungguh-sungguh)
- Contoh berdasarkan ceklist pada indicator, maka sdr. Arifin Prasetyo, memperoleh “skor 4 = 2 kali, skor 3 = 1, maka Nilai sikap spiritualnya adalah “Sangat Baik” menjadi Nilai.
 - Contoh berdasarkan hasil ceklist di atas, maka sdri. Asaroh Nurwiyah memperoleh Predikat “ Baik”, sedangkan Asrubi Nurhidayat memperoleh predikat “ Cukup”.

Lihat table konversi Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran, sbb,

sikap		Pengetahuan		Ketrampilan	
Modus	Predikat	Skor rerata	Huruf	Capaian optimum	Huruf
4,00	Sangat Baik (SB)	3,85 – 4,00	A	3,85 – 4,00	A
		3,51 – 3,84	A-	3,51 – 3,84	A-
3,00	Baik (B)	3,18 – 3,50	B+	3,18 – 3,50	B+
		2,85 – 3,17	B	2,85 – 3,17	B
		2,51 – 2,84	B-	2,51 – 2,84	B-
2,00	Cukup (C)	2,18 – 2,50	C+	2,18 – 2,50	C+
		1,85 – 2,17	C	1,85 – 2,17	C
		1,51 – 1,84	C-	1,51 – 1,84	C-
1,00	Kurang (K)	1,18 – 1,50	D+	1,18 – 1,50	D+
		1,00 – 1,17	D	1,00 – 1,17	D

2. Penilaian Sikap Sosial

Insttrumen Penilaian menggunakan Jurnal

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam proses pembelajaran.

Berilah skor 1-4 pada kolom indicator perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran , dengan kriteria sebagai berikut :

4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = kurang

Penilaian sikap (KI-2) Pada saat Mengikuti Proses Pembelajaran

No	Nama Siswa	Indikator perilaku				skor	Nilai
		Kedisiplinan	Tang jawab	Kerjasama	Keaktifan		
1	Anton Budiyanto	4	3	4	4	15	SB
2	Anwar Zain	2	2	3	2	9	C

Skor yang paling banyak muncul (modus) untuk sdr. Anton adalah 4 = SANGAT BAIK. Skor yang paling banyak muncul (modus) sdr. Anwar adalah 2, maka predikat “CUKUP” (Baca Permendikbud 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran).

3. Penilaian Pengetahuan:

Tes tertulis dalam bentuk essay/uraian.

Instrumen penilaian:

- 1) Bagaimana memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI?
- 2) Jelaskan peran daerah dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia!.
- 3) Bagaimana caranya upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa ?
- 4) Bagaimana bentuk partisipasi secara aktif warga untuk menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya

4. TUGAS

1. Identifikasi karakteristik daerah tempat tinggal yang Saudara ditinjau dari sumber daya alam, luas daerah, peran daerah menuju kemerdekaan, keunggulan daerah, dsb !
2. Carilah data, para tokoh/pejuang di daerah tempat tinggal kalian merebut kemerdekaan!

Petunjuk penskoran:

- Tiap soal memperoleh skor maksimum 4, skor minimum 1
- Jumlah skor seluruh soal = $5 \times 4 = 20$
- Nilai ideal = 4

Pengolahan skor menjadi Nilai.

$$\text{Formula Nilai} = \frac{\text{jumlah perolehan skor}}{16} \times 4$$

Contoh : Arkananta memperoleh skor 14, maka nilai = $\frac{14}{16} \times 4 = 3,5$

Lihat table kolom pengetahuan di bawah ini, maka Arkanata = A-

lihat Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran, sbb,

Sikap		Pengetahuan		Ketrampilan	
Modus	Predikat	Skor rerata	Huruf	Capaian optimum	Huruf
4,00	Sangat Baik (SB)	3,85 – 4,00	A	3,85 – 4,00	A
		3,51 – 3,84	A-	3,51 – 3,84	A-
3,00	Baik (B)	3,18 – 3,50	B+	3,18 – 3,50	B+
		2,85 – 3,17	B	2,85 – 3,17	B
		2,51 – 2,84	B-	2,51 – 2,84	B-
2,00	Cukup (C)	2,18 – 2,50	C+	2,18 – 2,50	C+
		1,85 – 2,17	C	1,85 – 2,17	C
		1,51 – 1,84	C-	1,51 – 1,84	C-
1,00	Kurang (K)	1,18 – 1,50	D+	1,18 – 1,50	D+
		1,00 – 1,17	D	1,00 – 1,17	D

4. Penilaian Keterampilan:

- Buatlah kelompok 4 orang.
- Lakukan telaah/kajian tentang “Sejarah perjuangan rakyat di daerah tempat tinggal Saudara untuk menuju Negara kesatuan Republik Indonesia”.
- Buatlah laporan secara tertulis spasi 1,5 huruf roman dan tayangkan pokok-pokok hasil kajian (gunakan power point) di depan kelas.
- Lakukan identifikasi rambu-rambu yang pernah Anda lihat dan jelaskan makna dari rambu-rambu lalu lintas tersebut!

Instrumen Penilaian:

Penilaian Presentasi (KI-4)

Rubrik penilaian proyek (Keterampilan)

Rubrik Penilaian Hasil Akhir Kemampuan Melaporkan Hasil kajian tentang

No	Aspek yang diamati	Indikator	Ya	Tidak
1.	Perencanaan			

No	Aspek yang diamati	Indikator	Ya	Tidak
	a. Persiapan	Apakah Kegiatan sudah direncanakan secara matang?		
	b. Isi materi	Apakah isi materi sudah memunculkan ciri khas dari sesuatu yang hendak dicapai?		
2.	Pelaksanaan			
	a. Sistematika Kegiatan	Apakah kegiatan sudah direncanakan secara runtut?		
	b. Keakuratan Informasi	Apakah sudah ada sasaran sumber informasi, instrumen mencari data		
	c. Kualitas Sumber Data	Kelengkapan dan kedalaman data		
	d. Sajian Data	Penyajian data menarik dan didukung dengan fakta		
	e. Penarikan kesimpulan	Kesimpulan berdasarkan perolehan data		
3.	Performance			
	a. Performans	Kelengkapan laporan dan penampilan		
	b. Penguasaan	Penguasaan hasil telaah		

Penskoran penilaian presentasi:

Skor 1 – 4

Skor 4 - bila Ya dan direncanakan sangat baik

Skor 3 - bila Ya dan direncanakan baik

Skor 2 - bila Ya dan direncanakan cukup/kurang baik

Skor 1 - bila Ya dan direncanakan tidak baik

Skor maksimum seluruhnya = $9 \times 4 = 36$

Skor terendah seluruhnya = $9 \times 1 = 9$

Nilai = $\frac{\text{perolehan skor}}{\text{skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$

Misal: Arief Hakim, memperoleh skor 30, maka nilainya = $\frac{30}{36} \times 4 = 3,33$, lihat kolom ketrampilan, maka Arkananta = B+

lihat Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran, sbb,

Sikap		Pengetahuan		Ketrampilan	
Modus	Predikat	Skor rerata	Huruf	Capaian optimum	Huruf
4,00	Sangat Baik (SB)	3,85 – 4,00	A	3,85 – 4,00	A
		3,51 – 3,84	A-	3,51 – 3,84	A-
3,00	Baik (B)	3,18 – 3,50	B+	3,18 – 3,50	B+
		2,85 – 3,17	B	2,85 – 3,17	B
		2,51 – 2,84	B-	2,51 – 2,84	B-
2,00	Cukup (C)	2,18 – 2,50	C+	2,18 – 2,50	C+
		1,85 – 2,17	C	1,85 – 2,17	C
		1,51 – 1,84	C-	1,51 – 1,84	C-
1,00	Kurang (K)	1,18 – 1,50	D+	1,18 – 1,50	D+
		1,00 – 1,17	D	1,00 – 1,17	D

5. Penilaian Praktik:

1. Coba praktikkan 3 macam pengaturan lalu lintas melalui gerakan.
2. Praktik peragaan akan dilakukan pertemuan minggu depan.

[illegible]

Petunjuk penilaian:

Diberi skor 4, bila dalam praktik dilakukan dengan “sangat sempurna”

Diberi skor 3, bila dalam praktik dilakukan “baik”

Diberi skor 2, bila dalam praktik dilakukan “ cukup”

Diberi skor 1, bila dalam praktik dilakukan “tidak baik”.

Petunjuk penilaian:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah persentase skor siswa}}{\text{jumlah skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$$

$$= \frac{41}{42} \times 4 = 3,67. \text{ Ini berarti Arifin Prasetyo A- (A minus)}$$

Mengubah skor menjadi nilai, menggunakan rumus :

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{jumlah persebaran skor}}{\text{skor maksimum seluruh indikator}} \times \text{nilai ideal}$$

Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul), misalnya angka yang sering muncul adalah 3, maka nilainya adalah 3, artinya mendapat nilai B (baik)

G. MEDIA PEMBELAJARAN/ALAT BANTU PROSES PEMBELAJARAN

1. Peta Indonesia
2. Peta Kab. Malang
3. Gambar sumber daya alam di Kab. Malang dan Kota Batu
4. Gambar tokoh pejuang Kab. Malang menuju kemerdekaan RI.
5. Rambu-rambu Lalu Lintas

H. SUMBER PEMBELAJARAN

1. Buku *Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PPKn SMP/MTs Kelas VII*, oleh Drs. Supandi, M.Pd, dkk. Jakarta: 2015
Penerbit: Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
2. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII*, Jakarta :
Penerbit: Kemdikbud, 2013,
3. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs* oleh Tim
Penyusun. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
2009
4. Tokoh pejuang Kab. Malang
5. Referensi sesuai materi pokok

Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Malang, Maret 2016
Guru Mata Pelajaran PPKn,

.....
NIP :

.....
NIP

BAB IV

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana atau sarana untuk membantu guru PPKn SMP/MTs dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan pendekatan, serta model-model pembelajaran inovatif dan relevan.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan terdapatnya Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat* (Tesis)
- Farouk Muhammad, 1998. *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press, Jakarta.
- Salikum, dkk 2013, *Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII*, Jakarta : Kemdikbud, 2013
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.
- Republik Indonesia, 1993, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia, 2009 Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs.* Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009
- Republik Indonesia, 2009 Materi Sosialisasi UUD 1945 oleh Sekjen. MPR RI, 2004
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Republik Indonesia, Peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu lintas
- Republik Indonesia, 2013 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia
- Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi identifikasi kendaraan.
- Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang surat ijin mengemudi (SIM).
- Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
- Republik Indonesia, 2013 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas

- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian,
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 58 Tahun 2013 tentang Kurikulum SMP-MTs,
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, 2014 *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014 *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran*. Kemdikbud, Jakarta
- Republik Indonesia, 2014 *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMP*. Kemdikbud, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia, 2010 Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "mewujudkan pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional."
- Republik Indonesia, 2013., *Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 19*
- Subono, 2009. *Etika dan Budaya Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta